

Kontribusi Pembiayaan, NPF, dan Perkembangan Bank Syariah serta Digitalisasi terhadap Peningkatan UMKM di Indonesia

¹*Puji Yuniarti, ²Fitra Dila Lestari, ³Daru Putri Kusumaningtyas, ⁴Rizka Zakiah
^{1,2,3,4}Universitas Negeri Jakarta
Jakarta Timur, Indonesia

¹pujiyuniarti@unj.ac.id, ²fitradilalestari@unj.ac.id, ³daruputrikusumaningtyas@unj.ac.id,
⁴rizkazakiah@unj.ac.id

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 11/08/2023

Diterima : 22/08/2023

Dipublikasi : 24/08/2023

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul kontribusi pembiayaan, NPF, dan perkembangan bank syariah serta digitalisasi pada peningkatan UMKM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan, NPF, dan banyaknya unit pelayanan syariah (UPS) bank syariah terhadap peningkatan jumlah UMKM di Indonesia serta untuk mengetahui teknologi digital yang sesuai dan efektif dikembangkan pada UMKM di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan dan berbagai literasi yang sudah dipublikasikan. Variabel-variabel yang digunakan meliputi pembiayaan (X1), NPF (X2), UPS bank syariah (X3), dan jumlah UMKM (Y). Analisis data menggunakan regresi berganda model OLS dengan tingkat signifikan 5%. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah NPF (X2) Sedangkan pembiayaan (X1) dan UPS bank syariah (X3) tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah UMKM di Indonesia. variabel-variabel independen (pembiayaan, NPF, dan UPS bank syariah) memberikan pengaruh sebesar 59,9% terhadap peningkatan jumlah UMKM. Selanjutnya, penerapan aplikasi *Smart Dashboard* akan mampu memberikan solusi serta rekomendasi yang tepat dalam *menjamin* keberlangsungan dan kesuksesan UMKM menuju bisnis digital.

Kata Kunci: Bank Syariah, Digitalisasi, Pembiayaan, NPF, UMKM

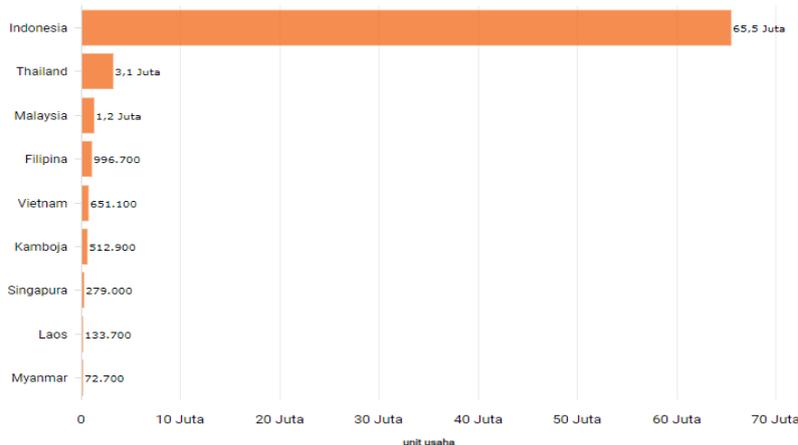
I. PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yang mampu mendukung dan memiliki potensi besar dalam sektor perekonomian di Indonesia, untuk meningkatkan roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang di rilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan



Menengah (Kemenkop UMKM) sepanjang 2022 (Putri, 2023) UMKM di Tanah Air tercatat tumbuh begitu baik, angkanya sudah mencapai 8,71 juta unit. Jika dilihat berdasarkan provinsi, Jawa Barat masih menempati urutan pertama UMKM terbanyak dengan jumlah mencapai 1,49 juta unit usaha. Sementara daerah paling sedikit diduduki oleh Papua dengan jumlah 3,9 ribu unit.

Menurut *ASEAN Investment Report* yang dirilis United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada September 2022, Indonesia memiliki jumlah UMKM terbanyak di kawasan ASEAN (Annur, 2023). Tapi, jika dilihat dari kinerjanya, Indonesia masih kalah dari Myanmar yang UMKM-nya mampu menyumbang hingga 69,3% terhadap PDB setempat. UMKM Indonesia juga tertinggal dibanding UMKM Singapura yang kontribusi ekspornya mencapai 38,3%, Thailand 28,7%, Myanmar 23,7%, dan Vietnam 18,7% (Ahdiat, 2022a).



Sumber: (Ahdiat, 2022a)

Gambar 1.1. Jumlah UMKM di Kawasan ASEAN Tahun 2021

Pada masa pandemi Covid-19 menghajar banyak sendi ekonomi, tak terkecuali sektor UMKM. Meski begitu, sektor UMKM terbukti masih mampu menjadi tumpuan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 61% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60% dari total investasi di Indonesia (K, 2022). Proporsi serapan tenaga kerja UMKM Indonesia sebesar 97% merupakan yang terbesar di ASEAN. UMKM di negara-negara tetangga hanya menyerap tenaga kerja di kisaran 35%-85%.

Pembiayaan UMKM di era terkini dapat menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Menurut Muttaqin et al. dalam Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa ataupun kegiatan lain dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan, maka pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam pemenuhan modal (Ertiyant & Latifah, 2022). Industri UMKM Indonesia memiliki potensi yang besar. Pihak perbankan syariah perlu dilibatkan dalam memastikan keberlanjutan dan pengembangan pembiayaan UMKM bagi nasabah yang telah menghimpun dana dari bank syariah selama periode COVID-19. Pandemi, orang-orang yang sebenarnya tidak bisa menjalankan tugasnya. Jika dibiarkan, kekurangan pendapatan akan memperburuk krisis ekonomi UMKM Indonesia.



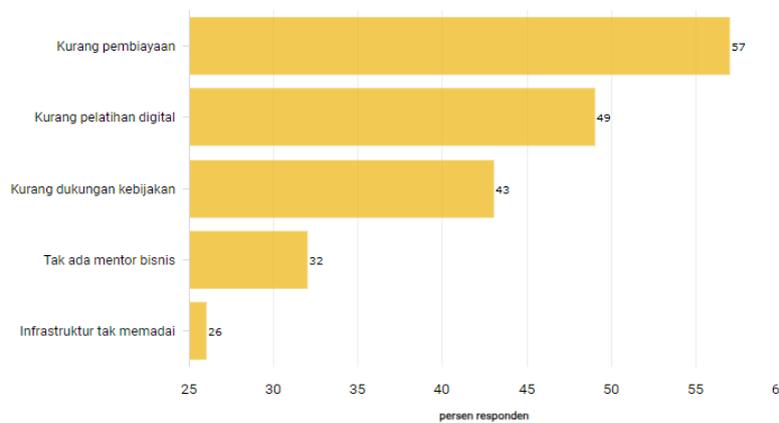
Tabel 1.1. Pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Tahun 2017-2020

Jenis Penggunaan	2017	2018	2019	2020
Modal Kerja	72.188	72.425	79.986	80.965
a) UMKM	28.973	27.392	32.236	35.579
b) NonUMKM	43.215	45.033	47.661	45.386
Investasi	47.427	48.773	53.207	56.203
a) UMKM	16.004	17.427	19.524	21.739
b) NonUMKM	31.422	34.346	33.683	34.464

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Diolah (Nuraeni et al., 2022)

Tabel 1.1. tersebut memperlihatkan porsi pembiayaan yang diberikan pada sektor UMKM lebih kecil dari sektor NonUMKM. Bank umum syariah (BUS) harus proporsional dan memperbesar penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM. Berbagai permasalahan mungkin akan dihadapi dalam penyaluran pembiayaan UMKM seperti pembiayaan bermasalah yang berisiko menurunkan laba dan kurangnya komitmen masyarakat bagi pengembangan UMKM. Namun sektor UMKM sebaiknya dapat dikembangkan berkesinambungan oleh BUS yang mampu menjadi media penyalur modal bagi para pelaku UMKM sebagai sektor penyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), pada tahun 2022 ada sekitar 64 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia (Ahdiat, 2022b). Namun, jumlah UMKM digital yang mampu berbisnis secara *online* baru sekitar 19 juta unit usaha atau 29%. Menurut Dedy Permadi selaku Alternate Chair Digital Economy Working Group (DEWG) G20 menyatakan Indonesia perlu menggarap sekitar 71% UMKM lainnya untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang di ruang digital. Mendorong UMKM untuk bertahan bahkan bisa *scaling up*, memperluas usaha dari sisi kualitas dan kuantitas. Setelah melakukan *scaling up*, maka bisa melakukan aksi *go international*. dengan tujuan agar UMKM berdaya saing di level global.



Sumber: (Ahdiat, 2022b)

Gambar 1.2. Lima Kendala Terbesar UMKM di Indonesia dalam Melakukan Transformasi Digital



This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Berdasarkan laporan Boston Consulting Group (BCG) dan Telkom Indonesia, dari sekitar 3.700 UMKM lokal yang disurvei, mayoritasnya terkendala melakukan transformasi digital karena kekurangan pembiayaan, serta kurangnya pelatihan kemampuan digital, kurang dukungan kebijakan, tidak ada mentor bisnis, dan infrastruktur digital yang belum memadai. BCG memberi berbagai rekomendasi untuk memperkuat program UMKM digital di Indonesia, mulai dari pemanfaatan data riset pasar sampai peningkatan akses pembiayaan secara digital. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat program UMKM digital di Indonesia. Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi UMKM yang memenuhi syarat pembiayaan. Pendekatan digital ini dapat membantu menyederhanakan proses pembiayaan sehingga lebih mudah dan lebih cepat.

Sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan, terkadang dalam memperoleh modal dari bank mereka mengalami kesulitan (Aryanti & Nurhalizah, 2022). Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diberlakukannya adanya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit mereka penuhi. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. UMKM pada sistem perekonomian saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. UMKM juga merupakan pelaku ekonomi yang strategis mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95% dari total jumlah usaha di Indonesia.

Perkembangan UMKM secara umum di Indonesia masih terbatas pada kecukupan modal sehingga perlu adanya alternatif pembiayaan dari Lembaga keuangan pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Fasilitas kredit sudah banyak yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, microfinance, maupun dari bank syariah. Diharapkan, melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit/pinjaman (*loan*) dari bank konvensional. *Non Performing Financing* juga harus senantiasa diperhatikan supaya tidak mengakibatkan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah yang berdampak bagi kemampuan menghasilkan laba dari bank umum syariah. Adanya keterbatasan kemampuan para pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan produksi. Dengan adanya ketersediaan unit pelayanan syariah (UPS) perbankan syariah dan akses digitalisasi yang tersebar di semua provinsi di Indonesia, UMKM akan dapat memenuhi kebutuhan permodalan dalam upaya mengembangkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu mengenai kontribusi pembiayaan untuk UMKM, bagaimana sebaiknya bank syariah menyikapi kebutuhan dari permodalan UMKM serta aplikasi digital yang bagaimana yang sesuai dan efektif diterapkan pada berbagai UMKM yang ada di Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian tentang Kontribusi Pembiayaan, NPF, dan Perkembangan Bank Syariah serta Digitalisasi terhadap Peningkatan UMKM di Indonesia



II. STUDI LITERATUR

Pembiayaan

Pembiayaan menurut Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Febyingtyas et al., 2022), pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, (c). Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna', (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijara Iuntuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah (BS) dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil bathil.

Non Performing Financing (NPF)

Menurut Zainul, NPF ialah kegiatan pembiayaan merupakan salah satu operasional perbankan yaitu dalam bidang untuk membantu pemenuhan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dana untuk kegiatan usaha maupun konsumsi. Pihak bank berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah, oleh karena itu pihak bank berkewajiban untuk merealisasikan komitmen tersebut agar tidak berdampak buruk bagi profitabilitas bank. Selain itu bank juga akan kemungkinan untuk menghadapi tuntutan dalam ganti rugi. Istilah NPF digunakan dalam perbankan syariah, untuk menggantikan konsep pinjaman/*loan* (Yuniarti et al., 2022).

NPF dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran (Nuraeni et al., 2022). Rasio NPF dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengidentifikasi kualitas pinjaman sebuah bank. NPF merupakan indeks keuangan yang digunakan untuk mengetahui risiko yang timbul dari ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman dan imbalan atas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. NPF yang tinggi berarti pembiayaan bank syariah semakin buruk

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga yang menggerakkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Fungsi lembaga ini sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah (Ertiyant & Latifah, 2022). Prinsip syariah dalam regulasi hukum, diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang prinsip bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

UMKM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Cahya et al., 2021) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdiri atas:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang



perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

III. METODE

Data Penelitian

Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berasal dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan saat penulis akses pada Juli-Agustus 2023. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan dokumen-dokumen yang sudah ada serta berhubungan dengan variabel penelitian tahun 2022, meliputi pembiayaan (X1), NPF (X2), UPS bank syariah (X3), dan jumlah UMKM (Y).

Tabel 3.1. Data Penelitian

Provinsi	Pembiayaan* (Dalam Milyar Rupiah)		NPF* (Dalam Milyar Rupiah)		KCP/ UPS (Unit)	Jumlah UMKM (Unit)
	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi		
Jawa Barat	6040	4731	463	131	235	1494723
Banten	1063	1253	98	27	62	339001
DKI Jakarta	12187	9175	502	224	159	658465
DI Yogyakarta	442	654	28	12	28	235899
Jawa Tengah	3702	4049	258	106	101	1457126
Jawa Timur	5247	3046	182	92	163	1153576
Bengkulu	164	464	10	12	11	83523
Jambi	303	787	13	19	17	57597
Nanggroe Aceh Darussalam	6038	2912	272	81	272	229101
Sumatera Utara	1961	1212	231	73	55	595779
Sumatera Barat	1049	788	36	24	36	296052
Riau	1767	2060	169	157	124	252574
Sumatera Selatan	1356	1219	41	18	36	330693
Bangka Belitung	77	353	3	0	5	30770
Kepulauan Riau	385	427	31	24	60	76217
Lampung	982	491	29	11	26	285909
Kalimantan Selatan	701	854	37	31	21	72113
Kalimantan Barat	207	2269	11	22	15	29813
Kalimantan Timur	377	1213	63	20	28	46824
Kalimantan Tengah	82	345	4	1	6	6606
Sulawesi Tengah	94	104	8	4	13	29706
Sulawesi Selatan	892	702	49	28	35	268299
Sulawesi Utara	68	41	6	0	6	116666
Gorontalo	2	27	0	-	4	85583
Sulawesi Barat	5	9	-	0	3	20111



Sulawesi Tenggara	182	123	16	11	9	8978
Nusa Tenggara Barat	1022	505	75	17	46	287882
Bali	539	185	21	1	10	40764
Nusa Tenggara Timur	39	9	1	-	1	81742
Maluku	2	5	0	1	2	18789
Papua	7	22	0	-	4	3932
Maluku Utara	54	42	1	1	8	4141
Papua Barat	1	10	0	-	2	4604

Sumber: (OJK, 2023)

Keterangan: KCP/UPS = Kantor Cabang pembantu/Unit Pelayanan Syariah
*Pembiayaan yang Diberikan dan NPF Berdasarkan Jenis Penggunaan, Golongan Debitur dan Lokasi Dati I Bank Umum Syariah Penyalur Pembiayaan Posisi Bulan Desember 2022

Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut

H1: Pembiayaan berpengaruh terhadap peningkatan UMKM

H2: NPF berpengaruh terhadap peningkatan UMKM

H3: UPS bank syariah berpengaruh terhadap peningkatan UMKM

Hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini selanjutnya dibuktikan melalui statistik Uji t dengan $\alpha = 0,05$.

Teknik Model Analisis

Dalam mengetahui pengaruh dari variabel pembiayaan (X1), NPF (X2), UPS bank syariah (X3), terhadap peningkatan jumlah UMKM (Y) di Indonesia tahun 2022, penulis dalam melakukan analisis statistik regresi berganda, uji korelasi, determinasi, uji T, dan uji F. pada tingkat signifikan 5%.. Penulis juga menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif digunakan penulis untuk menjelaskan digitalisasi pada UMKM.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari beberapa faktor terhadap peningkatan jumlah UMKM di Indonesia, tahun 2022. Penulis menggunakan SPSS 25 untuk melakukan analisis statistik regresi berganda atau *multiple linear regression model of ordinary least square (OLS)* pada tingkat signifikan 5%, dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Di mana:

Y = Jumlah UMKM

α = konstanta

X₁ = Pembiayaan

X₂ = NPF

X₃ = UPS Bank Syariah

β = Koefisien Regresi Variabel

e = Variabel Pengganggu

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Koefisien Korelasi



Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel pembiayaan, NPF, UPS bank syariah, terhadap peningkatan jumlah UMKM, hasil pengolahan data dianalisis menggunakan uji korelasi.

Tabel 4.1. Koefisien Korelasi Secara Parsial

		Pembiayaan	NPF	UPS_Bank_Syariah	Jumlah_UMKM
Pembiayaan	Pearson Correlation	1	,942**	,796**	,674**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	33	33	33	33
NPF	Pearson Correlation	,942**	1	,854**	,761**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	33	33	33	33
UPS_Bank_Syariah	Pearson Correlation	,796**	,854**	1	,683**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	33	33	33	33
Jumlah_UMKM	Pearson Correlation	,674**	,761**	,683**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	33	33	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh variabel pembiayaan (X1) terhadap peningkatan jumlah UMKM (Y) sebesar 0,674 yang termasuk dalam kategori kuat dan positif. Pengaruh variabel NPF (X2) secara terhadap peningkatan jumlah UMKM (Y) sebesar 0,942 termasuk dalam kategori sangat kuat dan positif. di Indonesia (Sig.<0,05). Pengaruh variabel UPS bank syariah (X3) terhadap peningkatan jumlah UMKM (Y) sebesar 0,796 termasuk dalam kategori kuat dan positif.

Tabel 4.2. Koefisien Korelasi Secara Simultan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,774 ^a	,599	,557	261995,863

a. Predictors: (Constant), UPS_Bank_Syariah, Pembiayaan, NPF

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi secara simultan menunjukkan bahwa pengaruh variabel pembiayaan (X1), NPF (X2), dan UPS bank syariah (X3) terhadap peningkatan jumlah UMKM (Y) sebesar 0,774 yang termasuk dalam kategori kuat dan positif.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.3. Koefisien Determinasi Parsial

Model	R Square
Pembiayaan	,454



NPF	,579
UPS Bank Syariah	,466

Dependent Variable: Jumlah_UMKM
 Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan SPSS 25 (Diolah)

- Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi secara parsial pada tabel 4, diperoleh
1. Variabel Pembiayaan (X1), nilai R² sebesar 0,454. Hal ini berarti bahwa variabel pembiayaan mampu mempengaruhi variabel peningkatan jumlah UMKM sebesar 45,4%
 2. Variabel NPF (X2), nilai R² sebesar 0,579. Hal ini berarti bahwa variabel *Non Performing Financing* mampu mempengaruhi variabel peningkatan jumlah UMKM sebesar 57,94%
 3. Variabel UPS Bank Syariah (X3), nilai R² sebesar 0,466. Hal ini berarti bahwa variabel UPS Bank Syariah di 33 provinsi di Indonesia mampu mempengaruhi variabel peningkatan jumlah UMKM sebesar 46,6%.

Uji T

Tabel 4.4. Koefisien Hasil Uji T

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1,133	,267
Pembiayaan	-1,048	,303
NPF	2,488	,019
UPS Bank Syariah	,485	,632
Jumlah UMKM	1,133	,267

Dependent Variable: Tingkat_Pertumbuhan_Ekonomi
 Sumber: Hasil Output SPSS 25 (Diolah)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi secara individual dengan uji t menunjukkan bahwa variabel NPF (X2) secara signifikan mempengaruhi peningkatan jumlah UMKM (Y) di Indonesia (Sig.≤0,05). Sedangkan variabel pembiayaan (X1) dan UPS bank syariah (X3) tidak signifikan terhadap peningkatan jumlah UMKM (Y) di Indonesia (Sig.> 0,05).

Pembiayaan

H1: Pembiayaan berpengaruh terhadap peningkatan UMKM
 Sign. 0,303>0,05 maka Ho diterima H1 ditolak, yang berarti pembiayaan (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah UMKM (Y).

NPF (Non Performing Financing)

H2: NPF berpengaruh terhadap peningkatan UMKM
 Sign. 0,019>0,05 maka Ho ditolak H2 diterima, yang berarti NPF (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah UMKM (Y).

UPS Bank Syariah

H3: UPS bank syariah berpengaruh terhadap peningkatan UMKM
 Sign. 0,632>0,05 maka Ho diterima H3 ditolak, yang berarti UPS bank syariah (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah UMKM (Y).

Uji F

Tabel 4.5. Koefisien Hasil Uji F

Model	F	Sig.
-------	---	------



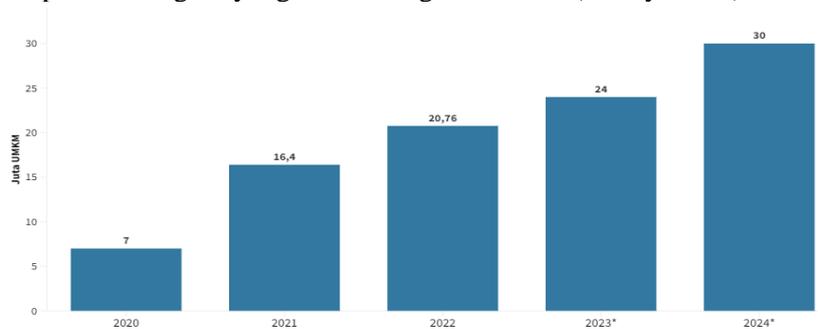
1	Regression	14,410	,000 ^b
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Jumlah_UMKM
 b. Predictors: (Constant), UPS_Bank_Syariah, Pembiayaan, NPF
 Sumber: Hasil Output SPSS 25 (Diolah)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi secara simultan dengan uji F menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (pembiayaan, NPF, dan UPS bank syariah) secara bersama-sama signifikan mempengaruhi peningkatan jumlah UMKM di Indonesia (Sig.≤0,05).

Digitalisasi UMKM

Demi bisa mencapai target pasar digital UMKM, Kemenkopukm menginisiasi transformasi digital UMKM melalui program Pahlawan Digital. Kemenkopukm akan memanfaatkan pusat layanan usaha terpadu. Selain itu, bakal dilakukan pendampingan UMKM di kota-kota sekunder. Kemenkopukm pun bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan platform digital yang cocok dengan UMKM (Rizaty, 2022).



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM
 Keterangan: *Target

Gambar 4.1. Jumlah UMKM yang Masuk ke Ekosistem Digital di Indonesia (2020 - 2024*)

Pemerintah terus mendorong agar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia bisa memasuki ekosistem digital. Pada 2022, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah UMKM yang telah masuk ekosistem tersebut mencapai 20,76 juta unit. Jumlah itu sudah meningkat 26,6% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 16,4 juta UMKM. Ini berarti sudah ada 32,44% dari 64 juta unit UMKM yang telah memasuki ekosistem digital. Kemenkopukm pun menargetkan UMKM yang bisa memasuki pasar digital bakal naik menjadi 24 juta unit pada tahun depan. Jumlahnya pun akan kembali meningkat hingga 30 juta unit pada 2024.

Pembukaan akses keuangan digital kepada UMKM dengan penawaran jasa keuangan yang mudah, cepat, dan terjangkau menjadi pondasi pemulihan ekonomi guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi. Program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-



keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Adanya dukungan kebijakan Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk UMKM *Go Online* mendapat respon yang cukup tinggi. Upaya ini dilakukan dengan cara UMKM mengadaptasi teknologi kreatif melalui pemasaran produk berbasis platform *online*. Hal ini memberi inspirasi Okfalisa, dkk. untuk menginisiasi penelitian penggunaan Sistem *Smart Dashboard* Rekomendasi Syariah *Fintech* pada tahun 2021. Riset ini difokuskan pada Digitalisasi UMKM Pasca-Covid-19 (K, 2022).

Secara keilmuan, konsep pada aplikasi *Smart Dashboard* Sistem Rekomendasi Syariah *Fintech* merupakan integrasi dari beberapa dasar keilmuan komputer sains, sistem informasi, dan data analisis melalui perancangan dan pembangunan aplikasi berbasis *data-driven Decision Support System (DSS)*, performansi kesiapan digitalisasi UMKM, dan Ekonomi dan Perbankan Syariah. *Hybrid* proses pada *data-driven DSS* merupakan suatu kontribusi baru dalam mengombinasikan proses analisis *big data* dengan pendekatan *DSS Fuzzy-AHP* dan *Data Mining* sehingga dapat diukur kesiapan digitalisasi UMKM Syariah, sebagai berikut:

- Dari perspektif ekonomi bisnis melalui peranan variabel bisnis *activity (BA)*, *management (MG)*, *transaction (TC)*, *marketing (MC)*, *micro-environment (MI)*, dan *macro-environment (MA)*, serta segi kesiapan Teknologi Informasi (IT) seperti *IT-education*, *IT-culture*, *IT (financial)*, dan *IT-infrastructure*.
- pemetaan dalam pengukuran kesiapan digitalisasi UMKM melalui pendekatan distribusi normal dilakukan untuk memetakan indeks level performansi UMKM dengan menggunakan teknik *Association Rules*.
- Clustering* atas *k-mean* dilakukan terhadap UMKM dengan mempertimbangkan kondisi 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, dan *Collateral*.
- Pendekatan *rulebase forward chaining* digunakan untuk memetakan hasil indeks level performansi UMKM dan *clustering k-mean* untuk mendapatkan rekomendasi terbaik produk syariah *fintech* yang tepat dengan perangkangan produk-produk yang digunakan.

Aplikasi *Smart Dashboard* ini dapat dijadikan pedoman dan sarana untuk memonitor pengelolaan perekonomian dan keuangan perbankan syariah di Indonesia. Seluruh komponen *Quadruple Helix* (Pemerintah, Akademisi, Perusahaan, dan Komunitas) terutama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pembuat keputusan, dapat bersama-sama memonitor dan mengevaluasi performansi UMKM, dan mengidentifikasi permasalahan dalam UMKM. Tujuannya, untuk memberikan solusi serta rekomendasi yang tepat dalam menjamin *sustainability* dan kesuksesan UMKM menuju bisnis digital. Dengan demikian, berbagai kebijakan strategis yang tepat dan lebih terarah dapat diberikan untuk mencapai keberhasilan bisnis UMKM dalam menghadapi era digital dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut variabel *Non Performing Financing/NPF (X2)* secara signifikan dan positif mempengaruhi peningkatan jumlah UMKM di Indonesia. Sedangkan variabel pembiayaan (X1) dan Banyaknya unit pelayanan syariah/UPS bank syariah (X3), tidak secara signifikan mempengaruhi peningkatan jumlah UMKM di Indonesia. Hasil analisis koefisien determinasi variabel pembiayaan, NPF, dan UPS bank syariah mampu menjelaskan peningkatan jumlah UMKM di Indonesia sebesar 59,9%. Aplikasi *Smart Dashboard* dapat mengevaluasi performansi UMKM,



dan mengidentifikasi permasalahan dalam UMKM yang bertujuan untuk memberikan solusi serta rekomendasi yang tepat dalam menjamin *sustainability* dan kesuksesan UMKM menuju bisnis digital.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada tempat mengabdikan penulis di Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis serta terima kasih juga kepada segenap keluarga besar penulis.

VII. REFERENSI

- Ahdiat, A. (2022a, October 11). *Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya?* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya>
- Ahdiat, A. (2022b, November 14). *Banyak UMKM Belum Bisa Bisnis Online, Ini Kendala Utamanya.* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/14/banyak-umkm-belum-bisa-bisnis-online-ini-kendala-utamanya>
- Annur, C. M. (2023, May 19). *Inilah Kriteria UMKM Berdasarkan Hasil Penjualannya Menurut PP 7 Nomor 2021.* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/19/inilah-kriteria-umkm-berdasarkan-hasil-penjualannya-menurut-pp-7-nomor-2021>
- Aryanti, F. P., & Nurhalizah, F. H. J. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699–709. <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/566>
- Cahaya, A. D., Widyastuti, M. L., & Fatharani, H. (2021). Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 138–149. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/613>
- Ertiyant, W. F., & Latifah, F. N. (2022). Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 199–206. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/9398>
- Febyningtyas, V., Juniwati, E. H., & Purbayati, R. (2022). Pengaruh Pembiayaan terhadap PDRB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Ditinjau dari Pariwisata Syariah Provinsi Aceh. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 735–747. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/jaief/article/view/2607/2030>
- K, R. D. T. (2022, August 26). *Smart Dashboard: Akselerasi Bagi Pengembangan UMKM Syariah.* <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Smart-Dashboard-Akselerasi-Bagi-Pengembangan-UMKM-Syariah.aspx>
- Nuraeni, H., Tripuspitorini, F. A., & Pakpahan, R. (2022). Pengaruh Pembiayaan UMKM, CAR, dan NPF Terhadap Return on Assets Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(1), 186–193. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/jaief/article/view/3876/3009>
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah.* Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2022/STATISTIK-PERBANKAN-SYARIAH-DESEMBER-2022.pdf>
- Putri, A. M. H. (2023, February 7). *Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi “Tameng”*



- Resesi?* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi>
- Rizaty, M. A. (2022, December 27). *20,76 Juta UMKM di Indonesia Masuk Ekosistem Digital pada 2022*. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/2076-juta-umkm-di-indonesia-masuk-ekosistem-digital-pada-2022>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Rini, R. S. (2022). Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Pembiayaan, NPF, dan Kepadatan Penduduk. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan (JUMPA)*, 9(2), 1–9. <https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JUMPA/article/view/442/365>

